

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Rapat ke-	: 13
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan: 1. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero); 2. Direktur Utama Perum Perhutani; 3. Direktur Utama PT Inhutani I; dan 4. Direktur Utama PT Inhutani V.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 6 Desember 2022
Waktu	: 13.20 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta
Acara	: 1. Penjelasan mengenai Kinerja Perusahaan; 2. Rencana dan Program Strategis Tahun 2022-2023; dan 3. Isu-isu aktual.
Ketua Rapat	: Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat	: Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. 30 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI B. Hadir Undangan: 1. Mohammad Abdul Ghani, Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) beserta jajaran; 2. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum Perhutani) beserta jajaran; 3. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I) beserta jajaran; dan 4. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani V) beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

RDP Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama PT Inhutani I, dan Direktur Utama PT Inhutani V, mengenai Penjelasan tentang Kinerja Perusahaan, Rencana dan Program Strategis Tahun 2022-2023, dan Isu-isu aktual, dibuka pukul 13.20 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Perkebunan dan Bidang Kehutanan untuk meningkatkan kinerjanya, termasuk meningkatkan kualitas hutan dan kebun sebagai aset milik perusahaan.
2. Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk berkolaborasi dalam program-program strategis Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar wilayah kerja perusahaan.
3. Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) serta Perum Perhutani, PT Inhutani I, dan PT Inhutani V untuk menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan/atau Sosialisasi Program-program Berbasis Kemasyarakatan antara lain Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dengan melibatkan Komisi IV DPR RI.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan pengembangan usaha perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha yang dilakukan oleh Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) agar dapat meningkatkan kinerja untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas komoditas yang tinggi dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian Negara di sektor perkebunan dengan tetap melibatkan petani, UMKM, dan masyarakat sekitar.
5. Komisi IV DPR RI mendukung agar Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani segera menyelesaikan konflik lahan yang berada di wilayah kerja Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani, khususnya lahan yang dikuasai oleh rakyat/petani dengan memberikan solusi yang tidak menimbulkan konflik sosial.
6. Komisi IV DPR RI mendukung upaya pengelolaan aset Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani diantaranya melalui kegiatan agrowisata, dengan memperhatikan

peraturan yang berlaku sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan budaya.

7. Komisi IV DPR RI meminta Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) dan Perum Perhutani untuk melakukan evaluasi dan optimalisasi aset yang tidak digunakan karena tidak sesuai dengan peruntukannya, guna mengurangi beban hutang/kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan, pengelolaan, dan pengendalian manajemen secara profesional.
8. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) pada Tahun 2023, dalam rangka membahas Perkebunan Sawit Rakyat dan Pengelolaan Agrowisata.
9. Komisi IV DPR RI akan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan Perum Perhutani pada Tahun 2023, dalam rangka membahas Pengelolaan Ekowisata dan Program Kelestarian Sumber Daya Hutan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151

Direktur Utama
Holding Perkebunan Nusantara
PTPN III (Persero),

Ttd.

Mohammad Abdul Ghani

Direktur Utama
Perum Perhutani,

Ttd.

Wahyu Kuncoro